

DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN POLITIK DI INDONESIA

¹Ifa Datuzuhriah, ²Umi Amelia Putri, ³Sirozi

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang
Email: Ifadatuzuhriah2000@Gmail.Com,

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang
Email: Umiamelia@Gmail.Com,

Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan
Universitas Islam Negri Raden Fatah Palembang
Email: Sirozi_Uin@Radenfatah.Ac.Id

Abstract Political education in Indonesia is experiencing complex dynamics influenced by regulatory changes, advances in information technology, and increasing political participation of the younger generation. However, crucial problems include low political literacy, unequal access to political education, the practice of money politics, and polarization that hinders objective political learning. The lack of public understanding of the system and its political rights is a major challenge. Political education that is less oriented towards democratic values, freedom of expression, and tolerance makes society vulnerable to information manipulation and identity politics. This study analyzes these dynamics and problems, identifies the causal factors, and recommends strategies to improve the quality of political education. Low political literacy and unequal access cause a gap in political understanding. The practice of money politics and polarization create an unhealthy political climate, hindering critical and responsible political learning. Therefore, the role of formal and informal educational institutions in instilling democratic citizenship values is very important to realize a dignified and sustainable democracy in Indonesia. This study contributes to the understanding of the challenges in building critical and responsible political awareness among the community.

Keywords/Kata Kunci: *Dynamics, Problematics, Political Education In Indonesia*

Pendahuluan

Pendidikan politik di Indonesia, pasca reformasi 1998, mengalami dinamika yang kompleks dan dihadapkan pada berbagai problematika yang saling berkaitan. Upaya demokratisasi yang digulirkan memang telah mendorong perkembangan pendidikan politik, terlihat dari meningkatnya jumlah organisasi masyarakat sipil yang aktif dalam pendidikan kewarganegaraan dan peningkatan akses informasi melalui media massa. Namun demikian, berbagai tantangan signifikan masih menghambat terwujudnya cita-cita warga negara Indonesia yang berpartisipasi aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rendahnya tingkat partisipasi politik, bukan hanya sekadar angka partisipasi pemilih dalam pemilu, tetapi juga meliputi partisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik di tingkat lokal maupun nasional, merupakan indikator utama permasalahan ini. Hal ini diperparah oleh merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga

negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang ditandai dengan tingkat kepuasan publik yang rendah dan persepsi korupsi yang tinggi. Praktik politik uang dan korupsi yang masih marak, baik di tingkat elit politik maupun di tingkat akar rumput, semakin memperburuk situasi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. (Nurdin, 2019: 148)

Perkembangan teknologi informasi dan media sosial, walaupun di satu sisi memungkinkan akses informasi politik yang lebih luas dan cepat, namun di sisi lain juga menimbulkan potensi penyebaran informasi hoaks dan disinformasi secara masif. Hal ini memicu polarisasi sosial dan politik yang tajam, mengancam stabilitas dan persatuan bangsa. Lebih jauh lagi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem politik Indonesia yang kompleks, ideologi negara Pancasila, konstitusi negara (UUD 1945), serta hak dan kewajiban warga negara sebagai pilar demokrasi, menjadi faktor penghambat partisipasi politik yang efektif dan berkualitas. Pemahaman yang dangkal ini membuat masyarakat rentan terhadap manipulasi politik dan mudah terpengaruh oleh propaganda yang menyesatkan. (Kadir, 2022: 200)

Adapun Rumusan Masalahnya adalah Bagaimana Dinamika Pendidikan Politik di Indonesia? Apa saja Problematika Pendidikan Politik di Indonesia? Apa saja Upaya Peningkatan Pendidikan Politik di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Dinamika Pendidikan Politik di Indonesia. Untuk mengetahui Apa saja Problematika Pendidikan Politik di Indonesia. Untuk mengetahui Apa saja Upaya Peningkatan Pendidikan Politik di Indonesia.

Oleh karena itu, penelitian mendalam tentang dinamika dan problematika pendidikan politik di Indonesia sangat relevan untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya sekedar mengidentifikasi masalah, tetapi juga bertujuan untuk mencari solusi dan strategi yang tepat dan komprehensif dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik dan partisipasi politik masyarakat. Makalah ini akan membahas lebih lanjut dinamika dan problematika tersebut secara rinci, menganalisis akar penyebabnya, dan menawarkan beberapa rekomendasi kebijakan dan strategi yang terukur untuk perbaikan sistem pendidikan politik di Indonesia guna mewujudkan masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensifnya terhadap dinamika dan tantangan pendidikan politik di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga bertujuan untuk menemukan solusi praktis dan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik dan partisipasi warga negara. Penelitian ini menggabungkan analisis historis pendidikan politik di Indonesia, meliputi masa kolonial, pasca kemerdekaan, dan era reformasi, dengan pemeriksaan kontemporer terhadap tantangan yang ditimbulkan oleh era digital. Penelitian ini menyelidiki berbagai isu kritis yang menghambat efektivitas pendidikan politik di Indonesia, termasuk rendahnya kesadaran politik, kualitas pendidikan yang tidak memadai, akses yang tidak merata, maraknya politik uang dan korupsi, dan ancaman radikalisme dan intoleransi. Penelitian ini melampaui identifikasi masalah dan mengajukan solusi konkret dan strategi untuk perbaikan.

Solusi tersebut meliputi penguatan peran lembaga formal dan informal, pemanfaatan teknologi secara efektif, peningkatan partisipasi masyarakat, dan peneguhan nilai-nilai demokrasi dan identitas nasional.

Kajian Pustaka

Menurut Michael Rush dan Philip Althoft partisipasi politik sebagai kegiatan warga Negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga Negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson dalam bukunya yang berjudul pembangunan politik di Negara-negara berkembang memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Menurut mereka, partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, karena partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga Negara yang memenuhi syarat. Pada zaman modern ini pemilu menempati posisi penting karena terkait dengan beberapa hal; Pertama, pemilu menempati posisi penting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi. Dhal mengatakan bahwa dua dari enam ciri lembaga-lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi skala besar adalah berkaitan dengan pemilu, yaitu para pejabat yang dipilih dan pemilu yang bebas adil dan berkala. Ketiga, pemilu penting dibicarakan juga terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu, pada fase tersebut Huntington menyebut pemilu sebagai alat serta tujuan dari demokratisasi. Pernyataan tersebut berangkat dari kenyataan tumbangnya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu. (Arniti, 2020: 344)

Jurnal dengan judul Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial, penulis: Jihan Alamri, Marham Bena, Yusril Katili , dan Sarfan Tabo, relevan dengan penelitian ini, karena membahas Pendidikan politik bagi generasi muda dan pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik. Metode kualitatif. Masalah yang Diangkat: Kurangnya minat pemuda terhadap politik. Solusi yang Diusulkan: Mengkomunikasikan informasi politik dengan gaya yang menarik dan relevan dengan generasi muda melalui media sosial. Alasan Pentingnya Pendidikan Politik bagi Generasi Muda: Generasi muda adalah bagian dari Indonesia. Generasi muda akan mendominasi pemilu 2024. Jurnal ini membahas pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam proses politik.

Pendidikan politik dapat membantu generasi muda memahami sistem politik, hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta cara untuk memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan politik. Jurnal ini menekankan peran media sosial dalam pendidikan politik. Media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan informasi politik, membangun kesadaran politik, dan memfasilitasi diskusi politik di kalangan generasi muda. Jurnal ini mengkaji bagaimana pendidikan politik dan media sosial dapat mempengaruhi partisipasi politik generasi muda. Partisipasi politik dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti menjadi pemilih, terlibat dalam partai politik, atau menjadi aktivis politik.

Artikel ini membantu memahami dinamika pendidikan politik di Indonesia dengan mengidentifikasi problematika utama, yaitu kurangnya minat generasi muda. Ini tercermin dalam minimnya partisipasi mereka dalam kegiatan politik dan rendahnya pemahaman mereka terhadap isu-isu politik. Artikel ini juga menawarkan solusi yang relevan dengan dinamika tersebut, yaitu dengan menggunakan media sosial sebagai instrumen pendidikan politik. Media sosial memiliki potensi besar untuk menjangkau generasi muda dengan konten yang menarik dan relevan dengan kehidupan mereka, sehingga dapat meningkatkan minat dan pemahaman mereka terhadap politik. Artikel ini menjabarkan bagaimana konten politik yang disampaikan melalui media sosial dengan gaya yang kreatif dan isu-isu yang relevan dengan generasi muda dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam proses demokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods) yang mengombinasikan studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mengedepankan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai topik yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur yang relevan, antara lain buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam dan ketahanan keluarga di era digital. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Data diambil melalui pencarian dan seleksi informasi dari berbagai sumber tertulis yang kredibel. Peneliti melakukan pencarian informasi dengan menggunakan kata kunci yang relevan untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan silang terhadap data untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi. Teknik Analisis Data: Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dan disintesis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.

Pembahasan

Dinamika Pendidikan Politik di Indonesia

Sejarah dan Perkembangan Pendidikan Politik di Indonesia

Penyebaran Pendidikan oleh Pemerintah Kolonial

Kebijakan dan usaha melestarikan dominasi Belanda di Indonesia dilakukan melalui usaha pendidikan. Menurut sistem pendidikan kolonial, sekolah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu sekolah untuk anak-anak Eropa (Belanda), untuk anak-anak Timur Asing, dan untuk anak-anak pribumi. Anak-anak pribumi keturunan bangsawan hanya bisa masuk ke sekolah untuk anak-anak Eropa dengan izin khusus dari penguasa kolonial. Sekolah yang mula-mula diperkenalkan adalah Sekolah Kelas Dua yang mendidik calon-calon pegawai rendah, dan Sekolah Kelas Satu yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atasan. Di samping itu ada pula Sekolah Rendah yang terutama disediakan bagi anak-anak Eropa. Sejak awal abad ke-20 diperkenalkanlah sistem Sekolah Desa (Volks-school), yang pendiriannya tergantung atas kemauan masyarakat setempat dan subsidi serta bimbingan pemerintah.

Setelah menyelesaikan sekolah ini kepandaian yang diperoleh hanya membaca, menulis, dan berhitung. Murid-murid yang terpilih dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah sambungan (Vervolgschool) untuk masa dua tahun. Secara berangsur-angsur sistem ini menggantikan Sekolah Kelas Dua sebagai lembaga pendidikan yang terpenting bagi anak negeri. Untuk keperluan anak-anak dari masyarakat kelas atasan didirikan pula HIS (Hollandsch Inlandsche School). Dalam sekolah ini secara berangsur dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Setelah menyelesaikan pelajaran selama 7 tahun di HIS, anak yang pandai dan orang tuanya cukup mampu dapat melanjutkan sekolahnya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dan selanjutnya bisa terus ke AMS (Algemeene Middelbare School).

Selain jalur HIS, MULO, dan AMS, ada jalur lain yaitu dari HIS melanjutkan ke HBS (Hoogere Burger School) yang masa belajarnya 5 tahun. Sebelum masuk HBS pada umumnya anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi pilihan masuk terlebih dahulu ke Europeese Lagere School (ELS) yang telah berdiri di Jakarta (Batavia) sejak tahun 1817. Sekolah ini seluruhnya memakai sistem dan tingkat pelajaran yang sama dengan yang berlaku di negeri Belanda. Pada masa itu pemerintah kolonial juga menyediakan sekolah-sekolah vak (kejuruan), seperti Sekolah Dokter Hindia (STOVIA), Sekolah teknik (Ambachtsschool), dan Sekolah Guru (Kweekschool). Kweekschool di Bukittinggi terkenal dengan nama Sekolah Raja, yang bukan hanya mendidik guru tetapi mendidik juga calon-calon pamong praja. Kemudian pemerintah kolonial juga mendirikan Sekolah Guru (Normaal School), Sekolah Mantri Kesehatan, Sekolah Pertukangan, Sekolah Perkebunan, dan Sekolah Magang. Pada tahun 1924 pemerintah memperkenalkan Sekolah Schakel, yang menghubungkan sekolah bumiputra dan sekolah Belanda. Sampai tahun 1930 jumlah murid pribumi di sekolah kejuruan sebanyak 15.716 orang; jumlah murid Belanda

hanya 5.233 orang. Dalam pertumbuhan jumlah murid sekolah menengah umum seperti MULO, AMS, dan HBS, antara tahun 1910 dan 1930 juga terjadi kenaikan yang besar. Pada tahun 1910 jumlah murid pribumi dari ketiga jenis sekolah tersebut hanya 5 orang, sedang pada tahun 1930 jumlahnya telah menjadi 7.776 orang.

Di samping sekolah dasar dan sekolah menengah, sekolah tinggi juga didirikan oleh pemerintah kolonial, yang juga dapat dimasuki oleh anak pribumi. Pada tahun 1924 Sekolah Teknik di Bandung ditingkatkan menjadi Technische Hooge School (THS). Pada waktu yang bersamaan Sekolah Hakim di Jakarta (Batavia) dijadikan Rechtskundige Hooge School" (RHS). Di samping belajar di dalam negeri, anak-anak pribumi juga diberi kesempatan untuk belajar di luar negeri, khususnya di negeri Belanda. Sampai tahun 1932 jumlah mahasiswa pribumi yang mendapat kesempatan belajar di negeri Belanda berjumlah 344 orang, sedangkan dari golongan Cina sebanyak 360 orang. Selain di negeri Belanda mahasiswa Indonesia ada juga yang belajar di Jerman dan Belgia serta Amerika Serikat. Selain dari itu mahasiswa Indonesia juga ada yang menuntut ilmu di Universitas al Azhar Kairo dan di Mekah. Sampai tahun 1930 jumlah mahasiswa Indonesia dan Semenanjung Melayu yang belajar di Kairo dan Mekah 350 orang. Mahasiswa Indonesia yang menuntut ilmu di Kairo dan Mekah umumnya berasal dari Sumatra.

Pertumbuhan Sekolah Swasta Nasional Kolonial

Sistem pengajaran kolonial yang dijalankan pada waktu itu mendapat tantangan dari beberapa golongan masyarakat Indonesia, terutama golongan pendidik. Mereka umumnya tidak puas karena di sekolah-sekolah pemerintah tidak diberikan pelajaran agama. Perasaan tidak puas itu diperkuat lagi karena titik berat pelajaran terutama mengenai bangsa Belanda. Pelajaran yang diberikan di antaranya adalah: bahasa Belanda, sejarah Belanda, geografi negeri Belanda, dan nyanian Belanda. Di sekolah pemerintah sangat kurang diberikan pelajaran mengenai Indonesia dan kebudayaannya. Keadaan yang tidak memuaskan inilah yang mendorong para pendidik Indonesia untuk memberikan pendidikan yang bersifat nasional. Sekolah-sekolah pemerintah Hindia Belanda hanya menghasilkan tenaga pegawai atau tenaga buruh untuk pemerintah kolonial dan perusahaan swasta Belanda. Pendidikan yang bersifat nasional harus lebih mengutamakan pelajaran mengenai Indonesia dan kebudayaannya termasuk pergerakan nasionalnya. Sekolah-sekolah swasta nasional yang didirikan pada waktu itu di antaranya adalah: Sekolah Muhammadiyah, IMS Kayu-tanam, Taman siswa, Ksatrian Instituut, Perguruan Rakyat dan lain-lain. Dalam pelaksanaannya sekolah dibagi menjadi dua, yaitu: "Sekolah Rendah" dan "Sekolah Dewasa". Ruang belajar merangkap menjadi tempat bekerja. Murid-murid dibiarkan membuat sesuatu menurut pikirannya sendiri. Jika ada sesuatu soal yang tidak bisa dipecahkan, baru diserahkan kepada majelis guru. Dengan bekal ilmu umum dan kejuruan yang memadai, diharapkan murid dapat mencari pekerjaan di masyarakat.

Pertumbuhan Kebudayaan Nasional Kolonial

Pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan nasional telah mulai semenjak timbulnya pergerakan nasional di Indonesia. Salah satu aspek penting yang

ditimbulkan oleh pergerakan nasional adalah persatuan nasional. Alat yang penting untuk mewujudkan persatuan adalah bahasa nasional yang dapat dite-rima oleh seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 1938 di Surakarta diadakan kongres bahasa Indonesia, dan salah satu keputusan penting dalam kongres itu ialah gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga dan sebuah fakultas untuk mem-pelajari bahasa Indonesia. Mulai saat itu bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa hukum dan sebagai alat pertukaran pikiran di dalam dewan-dewan perwakilan. Fraksi nasional di dalam Volksraad di bawah pimpinan M.H. Thamrin melancarkan aksi penggunaan bahasa Indonesia di dalam pidato di muka sidang Volksraad. (Suradi et al., 1986: 12)

Dari penjelasan masa kolonial di atas dapat di simpulkan bahwa, masa kolonial Belanda meninggalkan warisan pendidikan politik yang kompleks dan berdampak jangka panjang. Fokus utama pendidikan politik pada masa itu adalah pembentukan warga negara yang loyal dan patuh terhadap pemerintah kolonial, sebuah strategi yang secara sistematis membatasi akses pendidikan dan pengetahuan bagi sebagian besar penduduk. Sistem pendidikan yang diterapkan bersifat elitis, menekankan penguasaan bahasa Belanda dan pengetahuan Barat, serta secara sengaja mengabaikan pengembangan budaya dan pengetahuan lokal. Akibatnya, pendidikan politik pada masa kolonial hanya menjangkau kalangan elit, sementara mayoritas masyarakat luas terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai, menciptakan kesenjangan sosial dan pengetahuan yang berkelanjutan hingga masa kini. Hal ini menunjukkan betapa pendidikan politik pada masa kolonial merupakan instrumen kontrol sosial yang efektif, sekaligus menjadi faktor penting dalam membentuk identitas dan kesadaran politik masyarakat Indonesia pasca kemerdekaan.

Masa Proklamasi Kemerdekaan 1945

Pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Masa ini ditandai dengan perjuangan melawan kolonialisme, di mana pendidikan politik menjadi alat penting untuk membangun kesadaran dan semangat perjuangan. Pada saat era Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dinamika pendidikan politik menjadi bagian integral dari perjalanan bangsa yang baru merdeka. Pendidikan politik di era ini diwarnai oleh semangat patriotisme dan keinginan untuk membangun negara yang merdeka dan demokratis. Sekolah-sekolah yang telah terbebaskan dari pendudukan Jepang kembali berperan sebagai pusat penyiaran ideologi kemerdekaan dan nasionalisme. Pemerintahan nasionalis yang baru terbentuk melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berusaha merumuskan landasan pendidikan politik yang sesuai dengan nilai-nilai kemerdekaan dan kebangsaan. Pendidikan politik saat itu tidak hanya mencakup aspek teoritis, tetapi juga menjadi alat untuk membentuk karakter dan semangat kepahlawanan bagi generasi muda. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) menjadi wajib, dengan kurikulum yang menekankan kepentingan nasional dan kemerdekaan. Dinamika pendidikan politik di era Proklamasi Kemerdekaan juga

mencakup upaya memperluas akses pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah pedalaman. Pendidikan politik menjadi sarana untuk membentuk kesadaran politik dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan negara yang baru merdeka. Berbagai organisasi pemuda dan mahasiswa terlibat aktif dalam mendukung pendidikan politik, menjadi garda terdepan dalam menyebarkan semangat perjuangan dan nasionalisme. Pendidikan politik pada masa Proklamasi Kemerdekaan menjadi pilar utama dalam membangun fondasi demokrasi dan kebangsaan Indonesia. Dinamika ini menciptakan landasan yang kuat untuk perkembangan pendidikan politik di masa-masa mendatang, seiring dengan evolusi politik dan sosial bangsa Indonesia. (Saptadi et al., 2024: 35)

Masa Reformasi

Politik dan sosial yang terjadi pasca-jatuhnya rezim orde baru. Pemerintah Reformasi, yang dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie, mengambil langkah-langkah untuk membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas dan mengizinkan keberagaman ideologi. Reformasi pendidikan politik dimulai dengan revisi kurikulum nasional dan penyelenggaraan pendidikan yang lebih inklusif. Selain di tingkat kurikulum, dinamika pendidikan politik di era Reformasi tercermin dalam semangat pembaharuan institusi pendidikan tinggi. Terdapat upaya untuk memulihkan kemerdekaan akademis dan otonomi universitas, yang sebelumnya sering kali terbatas di era orde baru. Pembebasan berpendapat, kebebasan akademis, dan kebebasan berserikat di dalam kampus mendapatkan perhatian lebih dalam upaya menciptakan lingkungan akademis yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan sosial dan politik. Reformasi juga melibatkan partisipasi aktif mahasiswa dan masyarakat dalam menentukan arah pendidikan politik. Organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil turut serta dalam mengkritisi dan memberikan masukan terhadap kebijakan pendidikan politik. Semangat demokrasi dan hak asasi manusia menjadi tema utama dalam pembahasan pendidikan politik, dengan tujuan menciptakan warga negara yang lebih kritis, terinformasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Secara keseluruhan, dinamika pendidikan politik pada era Reformasi 1998 mencerminkan perubahan menuju pendekatan yang lebih demokratis, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang lebih beragam. Pendidikan politik menjadi sarana untuk membentuk warga negara yang lebih terlibat dan sadar akan hak-hak serta tanggung jawab mereka dalam membangun masyarakat demokratis. (Saptadi et al., 2024: 39)

Dari penjelasan masa kemerdekaan dan reformasi di atas dapat disimpulkan bahwa, perjalanan pendidikan politik di Indonesia pasca-kemerdekaan hingga era reformasi menunjukkan dinamika yang kompleks dan penuh perubahan. Setelah kemerdekaan, terjadi pergeseran signifikan dari pendidikan politik yang berorientasi pada loyalitas kepada pemerintah kolonial menuju pembentukan warga negara yang demokratis dan aktif berpartisipasi. Integrasi pendidikan politik ke dalam sistem pendidikan nasional melalui mata pelajaran kewarganegaraan dan pendidikan Pancasila merupakan langkah penting dalam upaya tersebut. Namun, perkembangan

pendidikan politik ini tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor dinamis, termasuk perubahan sistem politik, kebijakan pemerintah, dan perkembangan masyarakat secara keseluruhan. Reformasi 1998 kemudian membawa perubahan yang lebih mendasar, dengan fokus yang bergeser pada penguatan demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan perluasan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Meskipun demikian, tantangan dalam mewujudkan pendidikan politik yang inklusif, efektif, dan mampu mencetak warga negara yang kritis dan bertanggung jawab tetap menjadi agenda penting yang perlu terus dikaji dan dibenahi. Perjalanan ini menunjukkan bahwa pendidikan politik bukanlah proses yang statis, melainkan sebuah proses yang berkelanjutan dan selalu beradaptasi dengan konteks sosial-politik yang berkembang.

Pelaku Pendidikan Politik di Indonesia

Pendidikan politik di Indonesia melibatkan berbagai pelaku yang berperan dalam membentuk kesadaran politik, nilai-nilai demokrasi, dan partisipasi warga negara. a. Pemerintah: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memiliki peran utama dalam merumuskan kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan politik. b. Lembaga Pendidikan Formal: Sekolah dan universitas memainkan peran penting dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kewarganegaraan kepada siswa. Pendidikan Pancasila memainkan peran penting dalam membangun karakter siswa. Pendidikan Pancasila menjadi landasan moral dan etika yang kuat untuk membimbing generasi muda kita di era yang penuh dengan banyak tantangan dan dinamika sosial saat ini, dengan memasukkan pendidikan Pancasila sebagai bagian penting dari kurikulum sekolah, tujuan akhir adalah untuk memberi siswa pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai dasar Pancasila. (Putri et al., 2023: 1983) c. Organisasi Masyarakat (Ormas): Ormas seperti partai politik, organisasi kepemudaan, dan organisasi keagamaan dapat memberikan pendidikan politik melalui kegiatan dan program mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Pasal 1 angka 1 Tentang Organisasi Masyarakat yaitu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Malau et al., 2022: 102) d. Media Massa: Media massa, baik cetak maupun elektronik, memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi politik, membentuk opini publik, dan mendorong partisipasi politik. Pengaruh media sosial dalam dunia politik khususnya dalam hal komunikasi politik, terutama dalam kampanye Pemilu Penting bagi institusi politik untuk berpartisipasi aktif dalam komunikasi politik yang berbasiskan media sosial, terutama dalam kampanye Pemilu. (Juwandi et al., 2019: 374) e. Tokoh Masyarakat: Tokoh masyarakat yang berpengaruh dapat menjadi sumber pendidikan politik informal, memberikan contoh dan inspirasi kepada masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pelaku pendidikan politik di Indonesia terdiri dari berbagai aktor dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, namun seringkali tumpang tindih dan belum terkoordinasi secara optimal. Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga terkait, memiliki peran utama dalam menyusun kurikulum dan kebijakan pendidikan kewarganegaraan. Namun, efektivitasnya seringkali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan tinggi, dan media massa memiliki peran penting dalam mengajak partisipasi publik dan memberikan pendidikan politik yang kritis dan independen. Namun, akses dan jangkauan mereka seringkali terbatas, dan kualitas pendidikan politik yang mereka berikan juga bervariasi. Kesimpulannya, efektivitas pendidikan politik di Indonesia sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang lebih baik antar berbagai pelaku, dengan peran pemerintah sebagai fasilitator dan regulator utama, serta peran aktif dari partai politik, organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan tinggi, dan media massa yang bertanggung jawab.

Tren dan Tantangan Pendidikan Politik di Era Digital

Di balik panggung politik global, era digital telah mengubah lanskap politik secara dramatis. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi cara kampanye politik dijalankan, tetapi juga memperdalam partisipasi publik dan memicu perdebatan tentang etika dan dampak dari penggunaan teknologi dalam konteks politik. Di era digital ini, media sosial menjadi senjata utama dalam perangkat politik. Kandidat dan partai politik menggunakan platform seperti Twitter, Facebook, dan YouTube untuk menyebarkan pesan kampanye mereka secara langsung kepada jutaan pemilih potensial. Konten viral dan strategi pemasaran digital menjadi kunci untuk mempengaruhi opini publik dan memperoleh dukungan politik. Namun, kehadiran media sosial dalam politik juga membawa tantangan baru. Penyebaran berita palsu (hoax) dan disinformasi dapat dengan mudah menyebar luas dan dengan cepat, mengganggu proses demokrasi dengan mengaburkan garis antara fakta dan opini. Ini memunculkan kebutuhan akan literasi digital yang kuat di antara masyarakat untuk dapat memilah informasi yang benar dari yang tidak. (Lestari et al., 2024: 178)

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan politik di era digital ditandai oleh tren peningkatan akses informasi dan partisipasi politik melalui media sosial, namun juga dihadapkan pada tantangan signifikan. Kemudahan akses informasi berpotensi meningkatkan literasi politik, namun juga menimbulkan risiko penyebaran disinformasi dan polarisasi. Partisipasi daring memudahkan mobilisasi massa, tetapi juga rentan terhadap manipulasi dan serangan siber. Oleh karena itu, tantangan utamanya adalah mengembangkan strategi pendidikan politik yang responsif terhadap perkembangan teknologi digital, meningkatkan literasi digital dan media, serta membangun sistem verifikasi informasi yang kredibel untuk melawan hoaks dan disinformasi. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara

pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan platform digital untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif bagi pendidikan politik.

Problematika Pendidikan Politik di Indonesia

Kurangnya Kesadaran Politik di Masyarakat

Sebagian masyarakat enggan terlibat dalam politik, sebab politik itu buruk, pemikiran tersebut dilandasi oleh kekecewaan masyarakat terhadap janji yang tidak di tepati, penyalahgunaan jabatan maupun dana yang tidak sesuai penggunaannya. Namun, berbicara mengenai politik berarti sedang membicarakan perilaku setiap individu di dalam masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi politik mendorong setiap individu untuk bertindak menegosiasikan kepentingan masing-masing agar kemudian melahirkan kesepakatan bersama tanpa merugikan pihak manapun. (Zulfa et al., 2019: 18). **Contonya:** Abai terhadap Pemilu: Banyak warga yang tidak mendaftar sebagai pemilih, tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih berdasarkan iming-iming materi (politik uang) daripada visi dan misi calon. Hal ini menunjukkan rendahnya pemahaman tentang pentingnya peran warga dalam menentukan pemimpin dan masa depan bangsa.

Kualitas Pendidikan Politik yang Masih Rendah

Menurunnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik masyarakat dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap berbagai bentuk isu politik dan kejenuhan masyarakat proses demokratisasi yang belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap kualitas hidup warga negaranya. Pada akhirnya, akumulasi kekecewaan terhadap realitas politik yang dirasakan harus terjadi paling tidak mendorong terbentuknya sikap apatis politik. Jadi, pendidikan politik atau sering disebut dengan “pendidikan politik” adalah upaya pelibatan warga negara untuk menciptakan budaya yang tinggi partisipasi. (Lubis, 2023: 37). **Contonya:** Penyebaran hoaks dan disinformasi: Kemudahan akses informasi di era digital memudahkan penyebaran hoaks dan disinformasi yang mengancam integritas dan stabilitas politik. Masyarakat yang kurang melek media dan literasi politik mudah terpengaruh oleh informasi yang tidak benar, yang berujung pada polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat.

Kesenjangan Akses Pendidikan Politik

Sosialisasi politik terhadap generasi muda melalui media sosial secara tidak langsung akan mempengaruhi generasi muda itu sendiri disebabkan bonus demografi dan juga tingkat penggunaan media sosial warga Indonesia yang begitu padat. Akan tetapi tidak semua anak muda memiliki kecenderungan untuk berpartisipasi secara maksimal dalam politik karena isu yang dibicarakan dalam politik tidak relevan dengan kehidupan generasi muda, kondisi ketika kesempatan untuk mengakses pendidikan berkualitas tidak merata, sehingga berdampak pada kesenjangan dalam berpartisipasi politik. Jika melihat kondisi sekarang, keikutsertaan

pemuda dalam kontestasi politik hanya sampai pada pemahaman agar tidak golput dan berani berargumentasi, akan tetapi keinginan untuk bertarung gagasan didalam gedung eksekutif maupun legislatif sangatlah kurang. (Alamri et al., 2023: 58).

Contonya: - Akses Informasi: Di daerah terpencil, akses internet dan informasi politik masih terbatas, membuat warga sulit mendapatkan informasi tentang politik, kebijakan pemerintah, dan proses demokrasi. Kualitas Pendidikan: Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah di daerah terpencil seringkali kurang berkualitas dan tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kurangnya guru yang terlatih dan materi pembelajaran yang menarik membuat pemahaman tentang politik menjadi dangkal.

Politik Uang dan Korupsi

Politik uang merupakan upaya menyuap pemilih dengan memberikan uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuaap. Perilaku politik uang ini akan menghasilkan sebuah fenomena klientelisme dan patronase. Klientelisme adalah suatu bentuk pertukaran yang sifatnya personal dengan ciri-ciri adanya kewajiban dan hubungan kekuasaan yang terjadi dengan tidak seimbang antara mereka. Selain itu, ditandai dengan aktivitas-aktivitas patron yang menyiapkan akses untuk klien berupa sarana-sarana tertentu. Sehingga terbentuklah pola hubungan pertukaran timbal balik yang saling menguntungkan. Menurut Aspinal, patronase adalah sebuah pembagian keuntungan di antara politisi dan mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye. Tujuannya ialah mendapatkan dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik politik uang. Akibatnya ialah biaya politik yang tinggi. Maka dari itu, cara mencegah korupsi dapat diawali dari memberikan pendidikan politik mengenai politik uang. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, seringkali melibatkan pencurian, penggelapan, atau penipuan dana publik atau aset negara. (Pahlevi & Amrullohi, 2020: 142). **Contonya:** Pembelian Suara (politik uang): Praktik ini melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan agar mereka memilih calon tertentu. Contohnya, seorang calon legislatif membagikan uang tunai atau sembako kepada warga saat kampanye dengan harapan mereka akan memilihnya pada hari pemilu. Korupsi dalam Pengelolaan Dana Publik (korupsi): Ini melibatkan penyalahgunaan dana publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Contohnya, kasus korupsi bansos Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara pada tahun 2020. Juliari Batubara dan beberapa pejabat Kementerian Sosial lainnya diduga melakukan penggelapan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Mereka diduga melakukan mark-up harga dan memotong anggaran untuk keuntungan pribadi. Kasus ini menjadi sorotan publik dan memicu kemarahan masyarakat karena dana

yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin justru dikorupsi oleh pejabat negara.

Radikalisme dan Intoleransi

Radikalisme dan intoleransi adalah dua konsep yang saling terkait dan berbahaya. Radikalisme merujuk pada keyakinan atau tindakan ekstrem yang bertujuan untuk mengubah tatanan sosial secara drastis dan cepat, seringkali melalui kekerasan. Intoleransi adalah penolakan terhadap pandangan, keyakinan, atau perilaku yang berbeda dari diri sendiri. Intoleransi dapat mengarah pada diskriminasi, kekerasan, dan bahkan genosida. Terorisme: Penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Maraknya praktek radikalisme yang mengarah pada terorisme sebenarnya bermula dari benih-benih pemikiran dan tindakan intoleran yang menghinggapi sebagian kecil kelompok masyarakat di Indonesia.

Intoleransi adalah sikap atau perilaku yang menolak atau tidak menerima perbedaan dalam keyakinan, budaya, atau latar belakang seseorang. Intoleransi ditandai dengan sikap tidak menghargai, tidak menghormati, dan bahkan menentang orang lain yang berbeda dengan dirinya. Intoleransi yang terjadi di tengah masyarakat Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan karena tidak hanya menjangkiti sebagian kecil ormas keagamaan, namun juga telah menjadi “virus” yang menyerang pemuda, remaja, siswa, mahasiswa, dan generasi muda Indonesia. Intoleransi telah terlanjur menyebar bak penyakit di kalangan dunia pendidikan, baik sekolah dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. (Subagyo, 2020: 11). **Contonya:** (Radikalisme) Penyerangan terhadap tempat ibadah: Contohnya, serangan bom di Gereja di Surabaya pada tahun 2018, di mana pelaku termotivasi oleh ideologi radikal. (Intoleransi) Penolakan terhadap kelompok minoritas: Contohnya, penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah bagi umat beragama minoritas, atau penolakan terhadap kehadiran kelompok etnis tertentu di wilayah tertentu.

Pergantian Menteri

Setiap pergantian menteri, kurikulum hampir selalu berubah juga. Latar belakang pendidikan menteri juga menjadi landasan orientasi kurikulum yang diterapkan. Penyesuaian program pendidikan tidak menjadi masalah, karena diyakini topiknnya nantinya lebih baik serta lebih mudah menerima kesulitan di seluruh dunia. Namun, persoalan muncul ketika konten humanisme tidak dimasukkan secara memadai ke dalam kurikulum. Perubahan rencana pendidikan ini juga sebenarnya menambah bobot tersendiri bagi orang tua dalam hal pendanaan sekolah. Karena jika dilaksanakan pergantian kurikulum, mungkin akan mengganti buku, yang akan menyebabkan lebih banyak uang dihabiskan untuk membeli buku anak-anak.

Pendidikan Sebagai Alat

Untuk mempertahankan status quo, kepentingan ideologi dan politik antara lain memanfaatkan pendidikan sebagai alat. Misalnya, pendidikan cenderung digunakan sebagai alat kekuasaan pada masa Orde Baru, sehingga menghilangkan esensi pendidikan yang sejati. Bahkan pendidikan digunakan untuk mengindoktrinasi individu ke dalam masyarakat. Sistem pendidikan selama masa Pemerintahan Baru, pelaksanaan instruksi secara langsung dibatasi oleh kerangka peraturan dengan rantai yang sangat panjang dari tingkat fokus ke lokal dan bahkan ke tingkat unit pelatihan. Kepemimpinan semacam ini tidak diragukan lagi berdampak pada pendidikan, di mana tindakan pendidik sekarang dipandu oleh arahan dari atasan daripada perilaku profesional. Situasi seperti ini mengarah pada sikap pilih kasih terhadap atasan dan hilangnya hak dan otoritas profesional. Pendidikan, di sisi lain, menghasilkan individu-individu penurut yang takut membuat pilihan; tidak ada kemandirian karena lebih banyak paksaan dan kepura-puraan (Tintingon et al., 2023: 804).

Upaya Peningkatan Pendidikan Politik di Indonesia

Peningkatan Kualitas Guru dan Kurikulum

Menyelenggarakan pelatihan teknologi yang intensif dan berkelanjutan, dengan fokus pada aplikasi praktis teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Memastikan bahwa guru memiliki keterampilan teknologi dasar dan lanjutan yang diperlukan. Membangun atau menggunakan platform kolaboratif daring yang memungkinkan guru dari berbagai provinsi untuk berbagi pengalaman, sumber daya, dan ide. Mengadakan forum daring rutin atau webinar kolaboratif untuk memfasilitasi interaksi antar guru. Mengembangkan program pelatihan khusus yang membantu guru memahami dan mengimplementasikan kurikulum terkini. Memasukkan materi-materi pelatihan yang menguraikan perubahan dan penekanan dalam kurikulum nasional. (Sitopu et al., 2023: 13444)

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Era digital juga memberikan platform bagi gerakan sosial dan aktivisme politik untuk berkembang. Demonstrasi online, petisi digital, dan kampanye crowdfunding telah memungkinkan penggalangan dukungan untuk berbagai isu politik dan sosial dari segala penjuru dunia. Tidak hanya itu, teknologi dalam era digital juga memainkan peran penting dalam pemantauan pemilu dan sistem pemungutan suara. Wibowo, menjelaskan sistem elektronik dan aplikasi pemantauan pemilu membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, meskipun juga menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan data dan potensi manipulasi. (Lestari et al, 2024: 178)

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Melalui pendidikan politik, warga diberikan informasi secara cepat dan tepat, sehingga terjadi proses transfer nilai dan norma padahal tidak bergabung dengan partai politik terkait. Jadi, tujuan dan fungsi politik pendidikan adalah membangun kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, terutama dalam fungsi sosial dan politik; membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan tinggi kesadaran politik; meningkatkan pengetahuan, wawasan, keterampilan, tanggung jawab, dan etika tentang politik; dan mendorong peningkatan tingkat partisipasi politik aktif masyarakat. (Lubis, 2023: 37)

Penguatan Lembaga Pengawas dan Penegak Hukum

Upaya peningkatan integritas hakim sebagai penegak hukum harus beriringan dengan penguatan wewenang yang diberikan kepada Komisi Yudisial (KY) berupa wewenang memberikan sanksi kode etik terhadap hakim yang melanggar sesuai amanat konstitusi KY yang menjaga dan memelihara martabat dan kehormatan hakim yang mana KY berwenang dalam memberikan vonis kode etik, MA sebagai eksekutor dalam pelaksanaan vonis KY tersebut. Pentingnya kolaborasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam menegakkan sanksi kode etik ini akan memastikan bahwa hakim bertindak dengan integritas tinggi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dapat terjaga. Selain itu, pengawasan yang ketat dan transparan juga diperlukan untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan demikian, langkah-langkah proaktif dalam memperkuat kerjasama ini akan menciptakan lingkungan peradilan yang lebih adil dan efektif, di mana setiap tindakan hakim dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (Jabbar et al., 2022: 23)

Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi dan Kebangsaan

Nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKN diantaranya berkelakuan baik terhadap semua orang, saling menghargai pendapat temannya, bermusyawarah dalam mencari solusi bersama sama dan aktif menggagas ide-ide yang cermelang untuk kemajuan sekolah, serta bertutur kata baik di lingkungan sekolah, tanggung jawab dengan tugas pelajaran dan disiplin akan peraturan yang ada disekolah. Impelementasi nilai-nilai demokrasi dapat dijalankan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang digunakan yaitu melalui pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran PKN. Dalam hal ini dengan terciptanya implementasi nilai-nilai demokrasi pada siswa, maka dapat memberikan pengaruh baik pada pembentukan karakter demokratis pada diri siswa. (Maryam et al., 2022: 543) Dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam pembelajaran PKN di sekolah di harapkan peserta didik mampu memahami pentingnya saling menghargai, bermusyawarah, dan bertanggung jawab dalam perkataan atau perbuatan, sehingga dapat membentuk pemuda yang amanah, bisa menjadi penerus yang baik, serta dapat memajukan bangsa yang lebih sehat baik itu perkataannya maupun perbuatannya dalam berpolitik di Indonesia.

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian lainnya di masa depan dengan memberikan kerangka analisis yang komprehensif tentang dinamika dan problematika pendidikan politik di Indonesia. Analisis mendalam tentang faktor-faktor penyebab masalah, solusi, dan strategi yang diajukan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya untuk menggali lebih spesifik aspek-aspek tertentu. Misalnya,

penelitian mendatang dapat fokus pada analisis efektivitas solusi yang diajukan, evaluasi dampak teknologi terhadap pendidikan politik, atau pengkajian lebih lanjut mengenai peran lembaga-lembaga dalam membangun kesadaran politik di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti yang ingin mempelajari pendidikan politik di negara lain, terutama negara berkembang dengan sistem politik yang serupa dengan Indonesia.

Kesimpulan

Dinamika pendidikan politik di Indonesia menunjukkan perkembangan yang kompleks dan penuh tantangan. Meskipun reformasi telah membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih luas, masih terdapat berbagai problematika yang menghambat terwujudnya warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara, maraknya praktik politik uang dan korupsi, serta penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial, menjadi faktor penghambat utama. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem politik, ideologi negara, dan hak-hak kewarganegaraan juga turut memperburuk situasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan kualitas pendidikan politik, meliputi peningkatan literasi politik, penguatan pendidikan kewarganegaraan, dan pengembangan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah praktik-praktik koruptif. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, J., Bena, M., Katili, Y., & Tabo, S. (2023). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Instrumen Media Sosial. *Journal Governance And Politics (JGP)*, 3(1).
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Journal.Undiknas.Ac.Id*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Creswell. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Jabbar, T. M. Q., Parlindungan Harahap, & Aqil, N. A. (2022). Urgensi Penguatan Wewenang Komisi Yudisial Sebagai Upaya Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *RECHT STUDIOSUM LAW REVIEW*, 1(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32734/rslr.v1i1.9251>
- Juwandi, R., Nurwahid, Y., & Lestari, A. (2019). Media Sosial Sebagai Sarana Pendidikan Politik Untuk Mengembangkan Literasi Digital Warga Negara. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Untirta*, 2(1).

- Kadir, N. (2022). Media Sosial dan Politik Partisipatif : Suatu Kajian Ruang Publik, Demokrasi Bagi Kaum Milenial dan Gen Z. *Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/resiprokal.v4i2.225>
- Lestari, A. F., Asrinaldi, A., & Putri, I. A. (2024). Tren Dan Strategi Marketing Politik Dalam Era Digital: Sebuah Studi Literatur Dengan Fokus Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.23969/jp.v9i03.15891>
- Lubis, C. T. I. (2023). Penanaman Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Serentak 2024. *Jurnal Bakti Sosial*, 2(1).
- Malau, W. A., Yahfizham, Y., & Putri, R. A. (2022). Perancangan Dan Pembangunan Sistem Informasi Monitoring Ormas Pada Badan Kesbangpol Sumatera Utara. *JISTech (Journal of Islamic Science and Technology)*, 7(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jistech.v7i2.14664>
- Maryam, S., Nuswantari, Nuswantari, & Kokotiasa, W. (2022). Impelementasi nilai-nilai demokrasi pada mata pelajaran PKn dalam pembentukan karakter demokratis siswa kelas 8 di SMP Negeri 11 Madiun. *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)*, 1.
- Nurdin, P. H. (2019). Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik. *Jambura Law Review*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/Jalrev.V1i2.1977>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Jurnal Antikorupsi*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Putri, M. F. J. L., Putriani, F., Santika, H., Mudhoffar, K. N., & Putri, N. G. A. (2023). Peran Pendidikan Pancasila Dalam Membentuk Karakter Peserta Didik di Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5576>
- Saptadi, N. T. S., Zuraini, Rina, A., Lasri, Chairunnisa, Hayati, R., Raju, M. J., Indarwati, Rosalinda, Maulani, G., Wardoyo, T. H., Hadikusumo, R. A., & Sumiyati. (2024). *Pendidikan Politik*. PT SADA KURNIA PUSTAKA.
- Suradi, Safwan, Mardanas, Samsurizal, & Latuconsina, D. (1986). *Sejarah Pemikiran Pendidikan Dan Kebudayaan*. Suradi dkk, Sejarah Pemikiran Pendidikan Dan Kebudayaan (Direktorat Jenderal Kebudayaan
- Sitopu, J. W., Pitra, D. H., Pitra, Muhammadiyah, M., Nurmiati, A. S., Purba, I. R. P. R., & Sari, M. N. (2023). Peningkatan Kualitas Guru: Pelatihan Dan Pengembangan Profesional Dalam Pendidikan. *Communnity Development Journal*, 4(6). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v4i6.23718>
- Subagyo, A. (2020). Implementasi Pancasila Dalam Menangkal Intoleransi, Radikalisme Dan Terorisme. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.29100/jr.v6i1.1509>
- Tintingon, J. Y., Harol Reflie Lumapow, Rotty, & Joufree, V. N. (2023). Problematika dan Perubahan Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Educatio*, 9(2).

<https://doi.org/10.31949/educatio.v9i2.5088>

Zulfa, Sari, & Trisiana. (2019). Meningkatkan Kesadaran Politik di Kalangan Anak Muda. *Jurnal Global Citizen*.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s)

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

